

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu daerah harus mampu menghasilkan dan memaksimalkan setiap peluang daerah yang ada agar dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya kapasitas pemerintah Kota dalam menghasilkan prakiraan atau estimasi pendapatan asli daerah yang sangat tepat, sehingga mustahil pengumpulannya seefektif mungkin. Dengan bantuan UU No. 33/2004, peluang keuangan daerah dapat ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau modal daerah, diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat atau outsourcing yang lebih konstruktif, setiap daerah mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda. Secara umum, daerah yang mempunyai sumber daya alam atau kapasitas industry yang besar mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar secara nasional cenderung meningkat. Salah satu Kota yang secara alami berkembang pesat adalah Kota Makassar, baik dari segi jumlah penduduk maupun potensi ekonominya, sehingga mempengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

Tabel 1**Efektivitas Penerimaan PAD Kota Makassar tahun 2014-2020**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)
2014	831.661.964.000	730.988.641.339	88%
2015	992.147.612.000	828.871.892.853	84%
2016	1.286.067.656.000	971.859.753.606	76%
2017	1.484.865.937.000	1.337.231.094.232	90%
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.990	79%
2019	1.624.774.000.000	1.303.315.000.000	80%
2020	1.200.000.000.000	868.000.000.000	70%
2021	1.005.000.000.000	932.000.000.000	92%
2022	1.350.000.000.000	1.050.000.000.000	78%
Rata-rata (%)			82%

Sumber : BPKAD Kota Makassar Tahun 2023

Tabel 1 menunjukkan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama 6 tahun terakhir adalah 82% atau berada pada kategori yang cukup efektif tetapi setiap tahun mengalami fluktuasi, dimana tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2017 yaitu sebesar 90% atau berada pada kategori efektif. Sedangkan, pada tahun 2016 mengalami tingkat efektivitas terendah yang mana hanya sebesar 76% atau

berada pada kategori kurang efektif.

Tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi memberikan kestabilan keuangan bagi pemerintah daerah. Dengan sumber pendapatan yang memadai, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk belanja daerah dan program pengembangan ekonomi. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar setiap tahunnya menunjukkan bahwa suatu daerah semakin mampu menutup biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat. Kondisi ini terlihat di seluruh daerah yang tingkat kemandiriannya lebih tinggi. Kinerja keuangan daerah secara keseluruhan akan terlihat jika dibarengi dengan desentralisasi fiskal yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Apabila keuangan daerah mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi terwujudnya otonomi daerah di daerah tersebut, maka kinerja keuangan daerah dapat dikatakan baik. Karena 90% pendapatan dalam kasus tersebut berasal dari hak daerah, maka pajak dan retribusi daerah yang saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah pada khususnya.

Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi ketika status keuangannya terus membaik dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pertumbuhan

pendapatan seluruh masyarakat suatu daerah, atau kenaikan seluruh nilai tambah, inilah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Perekonomi dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain investasi dan pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, SiLPA (Kesenjangan antara realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran pada suatu siklus anggaran), dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah.

Menurut **Arsyad & Kawamura (2010)**, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan PDB atau GNP, terlepas dari sejauh mana pertumbuhan melampaui atau lebih rendah dari pertumbuhan penduduk atau pergeseran komposisi perekonomian.

Menurut Iskandar (2013), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan signifikan pendapatan nasional selama perhitungan tertentu (dengan meningkatkan pendapatan perkapita). Kapasitas suatu negara untuk menawarkan produk ekonomi yang lebih luas kepada masyarakatnya dalam jangka Panjang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi (**Todaro & Smith, 2011**).

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan produk domestic bruto (PDB) di tingkat nasional dan produk domestic regional bruto (PDRB) daerah di tingkat daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi pemerintah. Nilai PDB yang tinggi juga dianggap berarti bahwa negara tersebut dalam kondisi ekonomi yang baik. Pertumbuhan PDB berarti pertumbuhan atau kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran (output)

nasional. Tingkat pengangguran tidak selalu menurun seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu dampak kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti peningkatan lapangan tenaga kerja atau tingkat pendapatan individu.

Suatu masyarakat diasumsikan mengalami peningkatan kesejahteraan jika pendapatan perkapita terus meningkat, berdasarkan harga atau pendapatan, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) kota Makassar berdasarkan BPS disumbang oleh beberapa sektor yaitu : Pembelian tenaga listrik dan gas; Pengelolaan sampah; Konstruksi; Perdagangan dan eceran; Transportasi dan pergudangan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri dan Penggalian; DLL. Sektor perdagangan dan industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Makassar menurut sektornya antara tahun 2012 sampai dengan 2021. Kedua industri ini memberikan kontribusi rata-rata yang sama terhadap perekonomian kota selama sepuluh tahun terakhir, yaitu sebesar 19,5%. Ada potensial untuk beberapa sektor basis untuk melejitkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi hanya ada 4 sektor yang kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa banyak industri yang kekurangan persaingan, agar industri-industri tersebut tidak merugikan perekonomian, pertumbuhan industri-industri tersebut perlu didukung.

Untuk itu perlu adanya upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor perekonomian Kota Makassar dengan menggunakan analisis pertumbuhan ekonomi PDRB dengan menggunakan pendekatan basis

ekonomi. Dengan mengidentifikasi sector-sektor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengkaji hubungan antara wilayah-wilayah tersebut dengan Kota Makassar sebagai pelengkap, pendekatan basis ekonomi berupaya untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan wilayah-wilayah tersebut satu sama lain dalam hal pertumbuhan ekonomi.

Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka PDRB yang dilihat dari nilai konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Keputusan untuk menggunakan PDRB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilatarbelakangi oleh beberapa factor, khususnya antara lain:

1. Produk domestik bruto (PDB) mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan output perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan PDRB sejalan dengan peningkatan kompensasi unsur-unsur produksi yang digunakan dalam proses produksi.
2. Negara (Perekonomian Dalam Negeri) menjadi perimeter wilayah penghitungan PDRB.
3. PDRB merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik perkembangan suatu daerah, atau dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan PDB.

Anggaran merupakan alat pengelolaan, akuntabilitas, dan kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menstabilkan perekonomian daerah, dan mendistribusikan uang secara adil dengan tujuan pembangunan. Belanja daerah merujuk pada pengeluaran

pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek, sedangkan pendapatan asli daerah mencakup sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi lebih besar untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapatan dan mengelola belanja daerah dengan efisien.

Melalui penelaahan dan identifikasi terhadap peluang dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengawasan belanja daerah dan pendapatan asli daerah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah daerah mungkin perlu mencari sumber pendapatan baru atau memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini jika pendapatan daerah sangat minim. Perencanaan kebijakan fiskal jangka Panjang yang lebih efektif dimungkinkan bagi pemerintah daerah karena dampak belanja terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengambil Tindakan yang diperlukan dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana sumber pendapatan dan alokasi uang berdampak pada perekonomian daerah.

Penetapan kebijakan terkait desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terjadi bersamaan dengan pesatnya perkembangan daerah di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan keuangan daerah dan pembangunan, otonomi daerah menekankan pada fungsi dan kapasitas pemerintah daerah. Meski demikian, sejumlah daerah menyerap anggaran daerah dengan lambat, meski terjadi penurunan pendapatan sehingga dapat mempengaruhi belanja daerah.

Besarnya pendapatan yang dihasilkan daerah yang bersangkutan dapat mempengaruhi perkembangan belanja daerah. Untuk mengintegrasikan hasil pengelolaan sumber daya ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya disalurkan sebagai sumber pendapatan belanja, pemerintah daerah mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah di samping pendapatan yang tersedia saat ini.

Perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sebelum pandemik tumbuh sebesar 5% walaupun Indonesia mengalami situasi eksternal, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Sedangkan, Pada tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemik sebesar - 2,07%, penurunan tersebut masih relatif ringan berkat kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal dan bantuan sosial untuk mencegah kerugian ekonomi jangka panjang. Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan perekonomian Indonesia akan meningkat sebesar 3,5% pada tahun 2021 dan 4,8% pada tahun 2022. Sumber pertumbuhan pertama adalah pengeluaran, khususnya konsumsi (kisaran 5%), investasi (kisaran 6%), dan ekspor (kisaran 6%-7%), serta cara meningkatkan nilai tambah komoditas dan permintaan dunia. Sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan berapa pada kisaran 5,3%-5,9%.

Distribusi Anggaran Belanja pembangunan yang alokasinya relatif ke berbagai sektor dapat menjadi kebijakan pemerintah kota, yang mendorong sektor industri strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

sebelumnya yang hanya dikendalikan oleh pertanian. Secara teori, pemberian subsidi pada industry yang menguntungkan seharusnya mampu melipatgandakan pendapatan suatu daerah sekaligus meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain mendorong sector ekonomi produktif, strategi lain yang dapat dilakukan pengembangan sector social dan ekonomi yang dapat menarik sumber pendapatan baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

Perekonomian Kota Makassar berkembang karena beberapa variable, dan pada tahun 2021 nilai PDRBnya akan naik berdasarkan harga tahun 2010. Peningkatan produksi barang dan jasa di sejumlah domain bisnis turut berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh seberapa besar PAD dalam suatu daerah. Hal ini ditentukan oleh seberapa baik pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara berkelanjutan tanpa dapat menurunkan distribusi factor produksi atau memotong dana perimbangan pemerintah pusat. Penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar**” berdasarkan latarbelakang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar?
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Bagi peneliti dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
2. Bagi pemerintah suatu wilayah sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang lembaga yang dituju. Dan dapat menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan penelitian untuk studi banding

oleh pihak lain yang mendalami bidang keahlian terkait